

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 2
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:
1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Direktur Jenderal Hortikultura;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Jenderal Perkebunan;
5. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan.
Kementerian Pertanian
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 13 Januari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : Membahas:
1. Situasi dan Kondisi Pangan; dan
2. Isu-isu Aktual Lainnya.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 43 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir:
1. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
2. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
5. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian

- Pertanian); dan
6. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, membahas Situasi dan Kondisi Pangan dan Isu-isu Aktual Lainnya, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membatalkan rencana penerapan pola tanam IP=400 tanaman padi, jagung, dan kedelai, serta mengusulkan untuk menghitung ulang target produksi komoditas strategis sesuai dengan daya dukung lahan serta sarana prasarana pertanian.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam rangka peningkatan produksi padi tidak mengganggu target pelaksanaan tanaman komoditas jagung dan kedelai. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan tata kelola komoditas kedelai, termasuk di dalamnya mewajibkan importir untuk menyediakan bibit kedelai bagi pengembangan kedelai dalam negeri dan menyerap produksi kedelai petani nasional.
3. Dengan jumlah anggaran yang cukup besar, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan produksi ternak strategis, dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein bagi masyarakat.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan pemisahan wilayah penanaman bawang putih, yaitu lokasi kegiatan APBN kawasan bawang putih intensifikasi dan lokasi wajib tanam importir penerima Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar dalam menjalankan program Kartu Tani memprioritaskan daerah yang sudah memiliki sarana teknologi memadai dan tetap menyalurkan pupuk bersubsidi secara manual di daerah yang belum cukup memiliki sarana teknologi yang memadai.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengubah ketentuan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian menjadi lebih fleksibel, tidak hanya diberikan kepada Gapoktan/Poktan tetapi juga diberikan kepada lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data dan laporan tertulis perkembangan kegiatan *food estate* secara berkala, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.

8. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan kajian terhadap alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasannya, untuk mencari solusi terhadap mekanisme penyaluran yang setiap tahunnya selalu mengalami permasalahan.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian memperhatikan aspirasi masyarakat dan regulasi pendukungnya dalam pengembangan komoditas pertanian. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas, sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah disepakati, serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data jumlah petani dan jumlah luas lahan seluruh komoditas pertanian, dan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151

Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Suwandi, M.Si.

Direktur Jenderal Hortikultura
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.

Direktur Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.

Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kementerian
Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M.

Kepala Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng.

